

E-Policing Lalu Lintas yang Terintegrasi Secara Nasional

Feby Harianto

Mahasiswa Magister Ilmu Kepolisian Angkatan VII STIK-PTIK,
Jln Tirtayasa Raya Kebayoran Baru, Jakarta Selatan

Abstract

This paper discusses a creative breakthrough of Polantas in service to the community by using technology and information in an application that can be accessed through android integrated and connected to all areas of Indonesia. The purpose of this paper is to generate public confidence in Polantas and increase cooperation Polantas and the community in an on-line policing concept (e-Policing). This application is not a new entity in the traffic police body, by leveraging existing, measurable and developmental uses of IT, as it is in the Business Process Re-engineering (BPR) concept, creating a fast, precise, accurate, accountable, informative and accessible.

Keywords: E-Policing, integrated, public trust.

Abstrak

Tulisan ini membahas tentang sebuah terobosan kreatif dari Polantas dalam pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan teknologi dan informasi dalam sebuah aplikasi yang dapat diakses melalui android yang terintegrasi dan terkoneksi ke seluruh wilayah Indonesia. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk menimbulkan kepercayaan masyarakat terhadap Polantas serta meningkatkan kerjasama Polantas dan masyarakat dalam sebuah konsep pemolisian yang berbasis on-line (e-Policing). Aplikasi ini bukan merupakan sesuatu yang baru di tubuh Polisi lalu lintas, dengan memanfaatkan sesuatu yang telah ada, terukur dan dilakukan pengembangan menggunakan IT, sebagaimana terdapat dalam konsep Business Process Re-engineering (BPR), sehingga tercipta pelayanan yang cepat, tepat, akurat, akuntabel, informatif dan mudah diakses.

Kata kunci : E-Policing ; terintegrasi ; kepercayaan masyarakat.

Pendahuluan

Lalu Lintas merupakan urat nadi dalam kehidupan bermasyarakat, dan lalu lintas dapat dikatakan juga sebagai cerminan kebudayaan serta sebagai tingkatan modernitas suatu bangsa. Hal ini memberikan makna bahwa sebagai urat nadi dalam kehidupan bermasyarakat dipahami sebagai suatu masyarakat yang dapat hidup, tumbuh dan berkembang apabila memiliki produktifitas dalam kehidupannya. Produktivitas ini dapat dihasilkan melalui aktifitas-aktifitas yang didukung dengan adanya lalu lintas¹. Oleh karena itu menjadikan persyaratan utama dalam berlalu lintas adalah tersedianya rasa aman, selamat, tertib dan lancar. Begitu pula dengan lalu lintas yang dimaknai sebagai cermin budaya bangsa, konteks ini memberikan makna bahwa perilaku dalam berlalu lintas merupakan cerminan dari apa yang diyakini, dipahami serta pengetahuan yang dimiliki oleh suatu masyarakat maupun suatu bangsa.

Terkait dengan adanya lalu lintas sebagai cermin modernitas suatu bangsa, maka dapat dipahami bahwa pendekatan melalui pembangunan infrastruktur dan suprastruktur lalu lintas menjadikan konsep lalu lintas sebagai urat nadi dalam kehidupan bermasyarakat maupun cerminan budaya bangsa sebagai dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Perkuatan regulasi melalui Undang- Undang No. 22 tahun 2009 tentang lalu Lintas dan Angkutan jalan (LLAJ) serta penerapan teknologi dalam mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat, semata-mata dilakukan dalam rangka memberikan kepuasan guna menimbulkan kepercayaan masyarakat yang selama ini relatif menurun dan adanya opini negatif terhadap Polisi lalu lintas, akibat tindakan maupun perlakuan yang

dilakukan oleh oknum Polantas dalam beberapa kegiatan penegakan hukum, maupun kegiatan pelayanan kepada masyarakat itu sendiri. Sebagai contoh dalam kehadiran Polantas di Jalan raya, ketika seorang Polantas berusaha melakukan peneguran, maupun penilaian terhadap para pelanggar kendaraan bermotor dalam berlalu lintas, dianggap sebagai kegiatan "mencari-cari" dan menghambat pergerakan masyarakat di jalan raya. Begitu pula apabila ditemukannya infrastruktur yang rusak di jalan raya, seperti *traffict light*, jalan berlubang dan adanya rambu-rambu serta marka jalan yang tidak jelas atau rusak, semua tumpuan kesalahan ditimpakan kepada Kepolisian. Diibaratkan Polantas dibutuhkan untuk menangani berbagai masalah Kamseltibcarlantas, tetapi keberadaannya tidak diinginkan. Ini sebuah posisi yang berat bagi Polantas untuk merehabilitasi atau meyakinkan masyarakat². Hal ini menambah daftar panjang kekesalan masyarakat terhadap pihak kepolisian.

Perlu diketahui bahwa terdapat peran serta pemangku kepentingan lainnya terutama dalam membangun infrastruktur di jalan raya³. Dalam hal menjaga Kamseltibcarlantas, Polantas tidak bisa berdiri sendiri dalam menangani dan mencari solusi, karena terdapat peran serta dari institusi lainnya sesuai dengan perannya masing-masing, seperti Dinas Perhubungan, Bina Marga, Jasa Raharja dan lain sebagainya. Oleh karena itu diperlukan peningkatan kerjasama antara Polantas dan pemangku kepentingan lainnya di Jalan raya, dalam rangka meningkatkan kepercayaan masyarakat terutama terhadap Kepolisian.

Dalam tulisan ini penulis berupaya menerapkan sebuah model pemolisian antara polisi dan masyarakat yang didukung dengan teknologi dan informasi. Model merupakan konstruksi berpikir, membuat konsep,

1 Amanat Presiden SBY dalam apel penancangan Gerakan Nasional Pelopor Keselamatan Berlalu Lintas (<http://www.koranbireuen.com/2014/01/lalu-lintas-sebagai-cermin-budaya-bangsa/>)

2 Chrysnanda DL. Demokratisasi Pemolisian dan Strategi keluar dari zona aman. YPKI.2016

3 Chrysnanda DL. Kenapa mereka takut dan enggan berurusan dengan polisi ? Polantas dicaci dan dinanti. Hal 31 YPKIK.2013

menjabarkan dalam program-program, aksi/ penyelenggaraan, pengawasan, evaluasi dan pengembangan⁴. Permasalahan yang ada di masyarakat terutama yang berkaitan dengan lalu lintas perlu mendapatkan perhatian khusus oleh pemerintah, dimana Polisi sebagai *leading sector* dalam menciptakan Kamseltibcar lantans. Dengan berkembangnya teknologi dan informasi saat ini, maka sudah saatnya bagi Polri menggunakan kemajuan teknologi tersebut dalam rangka efisiensi kerja serta mengurangi administrasi dan birokrasi yang berbelit-belit dalam hal pelayanan kepada masyarakat.

Hal ini dilakukan dalam rangka menimbulkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap Polri yang selama ini telah dirusak oleh beberapa kegiatan, baik itu pelayanan maupun penegakan hukum yang ada di lalu lintas, yang tidak mendapatkan simpati masyarakat, bahkan respon yang diberikan bersifat negatif dari masyarakat kepada Polisi, terutama Polantas. Penggunaan teknologi dan informasi yang dimaksud adalah seiring dengan perkembangan teknologi pada era globalisasi saat ini. Dimana sistem *on-line* telah merasuki kehidupan masyarakat dan bahkan kini telah menjadi *trend* dan gaya hidup masyarakat ditengah-tengah aktifitas sosialnya.

Pemerintah telah membangun e-government, e-banking, bahkan adanya e-transport yang dengan mudahnya diperoleh dengan sebuah genggam *handphone* yang ada pada setiap individu dalam masyarakat. Oleh karena itu kepolisian harus mampu menampilkan model dan pola pemolisian melalui elektronik atau *electronic policing* (*e-policing*). *E-Policing* adalah pemolisian secara elektronik yang dapat diartikan sebagai pemolisian secara on-line, sehingga hubungan antara polisi dengan masyarakat bisa terjalin dalam 24 jam sehari dan 7 jam seminggu tanpa

batas ruang dan waktu, untuk selalu dapat saling berbagi informasi dan melakukan komunikasi. Bisa juga dipahami *e-Policing* sebagai model pemolisian yang membawa *community policing* pada sistem online⁵.⁵ Berdasarkan pemolisian yang berbasis IT tersebut ditambah dengan visi dan misi Kapolri saat ini yang dikenal dengan istilah Profesional, Modern dan Terpercaya (Promoter), dimana pengertian modern mengandung makna adalah melakukan modernisasi dalam layanan publik yang didukung teknologi, sehingga semakin mudah dan cepat diakses oleh masyarakat termasuk pemenuhan kebutuhan Almatsum dan Alpakan yang makin modern⁶.⁶ Adanya pemolisian yang berbasis IT, diharapkan mampu untuk memberikan efisiensi kerja maupun efisiensi pelayanan kepada masyarakat, serta menghindari hubungan langsung antara person to person yang dapat menimbulkan interpretasi yang berkonotasi negatif, serta kesan tidak transparan dalam pelayanan kepada masyarakat.

Tugas pelayanan publik sudah merupakan kewajiban Polri dalam mewujudkannya dari tingkat Mabes Polri hingga satuan terkecil di wilayah untuk memberikan informasi yang berkualitas, sesuai dengan standar pelayanan, dan memenuhi hak-hak warganegara / masyarakat serta adanya keterbukaan informasi.⁷ Pelayanan kepada masyarakat / pelayanan publik yang dilakukan oleh Polantas antara lain berupa pelayanan keamanan, pelayanan keselamatan, pelayanan administrasi, pelayanan informasi, pelayanan hukum dan keadilan, pelayanan sosial kemanusiaan. Hal ini menjadi tujuan utama dari Polri dalam kegiatan pelayanan publik untuk memperoleh kepercayaan dari masyarakat, karena *core bussines* Polri sebagai institusi non profit adalah pelayanan yang prima yang dapat

4 Chrysnanda DL. Ilmu kepolisian, kurikulum, pengajaran dan pengembangannya. Hal 11. STIK- Jakarta. 2015

5 ibid

6 Visi Kapolri Promoter, Modern. <http://news.detik.com/berita/3253952/cat- ini-visi-misi-kapolri-jenderal-tito>

7 Pasal 2 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2010 tentang Tata Cara Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia

secara signifikan dinikmati dan dirasakan oleh masyarakat sebagai pelayanan yang cepat, tepat, akurat, transparan, akuntabel, informatif dan mudah diakses⁸.

Berbagai inovasi bidang pelayanan telah diciptakan dan telah dikembangkan di tubuh kepolisian saat ini, termasuk di fungsi lalu lintas. Adanya Program e-tilang, sim on-line, samsat on-line, program NTMC, dan bahkan program IRSMS pada kecelakaan, merupakan inovasi dan kreasi Polantas dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat berbasis IT. Pemolisian secara online, untuk selalu dapat saling berbagi informasi dan melakukan komunikasi telah diterapkan di Polda Sumatera Utara mendapatkan apresiasi dari masyarakat Sumatera Utara. Program tersebut diberi nama dengan "Polisi Kita Sumatera Utara". Program atau aplikasi Polisi Kita yang dimiliki Polda Sumut terintegrasi dengan seluruh Polres di wilayah hukum Polda Sumatera Utara. Program ini dapat diakses menggunakan handphone android sebagaimana pernah diberitakan di Liputan6.com (05/02/2017), Medan; "Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) meluncurkan sistem aplikasi smartphone 'Polisi Kita Sumatera Utara'. Aplikasi "Polisi Kita Sumatera Utara" diluncurkan langsung oleh Kapolri Jenderal Tito Karnavian di Medan. Dalam peluncuran aplikasi yang bisa langsung diakses masyarakat melalui smartphone berbasis Android ini, Kapolri memberikan apresiasi tinggi kepada Kapolda Sumut, Irjen Rycko Amelza Dahniel. Sebab, aplikasi 'Polisi Kita Sumatera Utara' salah satu sistem yang terintegrasi program ini juga mampu diakses oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa mengenal batas waktu dan ruang / tempat, selama jaringan internet aktif pada wilayah tersebut. Segala pengaduan masyarakat, tentang

kejahatan, pelanggaran, kemacetan, serta adanya tindakan oknum polisi yang "nakal" di seluruh wilayah hukum Polda Sumut dapat dengan mudah diinformasikan dan dikomunikasikan dengan operator yang mengawasi program atau aplikasi tersebut. Pentingnya komunikasi dan informasi bagi institusi Polri maupun masyarakat saat ini menjadikan dua hal yang saling mendukung dalam kinerja kepolisian dalam memelihara situasi kamtibmas yang berada di wilayah hukumnya. Komunikasi boleh diartikan sebagai jembatan hati untuk saling memahami selain sebagai peredam konflik dan saluran-saluran untuk menyuarkan isi hati. Dengan komunikasi yang baik akan terbangun sistem yang baik dalam rangka membangun jejaring dan kemitraan. Komunikasi dan informasi dapat juga menjadi ikon pengetahuan dan modernitas.¹⁰

Terinspirasi dengan aplikasi yang telah dibuat dan dilaksanakan di Sumatera Utara tersebut, maka penulis mencoba berinovasi serta berkreasi terhadap permasalahan lalu lintas yang terkoneksi ke seluruh Polda, Polres bahkan Polsek di Indonesia. Aplikasi tersebut mencakup seluruh permasalahan dan kinerja Polantas sesuai dengan bidang-bidangnya. Termasuk laporan tentang kesalahan dan ketidaksesuaian sikap dan perilaku Polantas di jalan raya, pelayanan yang tidak baik, berbelit-belit, bahkan penanganan laka lantas yang lambat, penyidikan yang tidak transparan, semuanya dapat terakomodir dalam sebuah aplikasi android. Bukan hanya *content* pengaduan / *complain* masyarakat, tetapi juga kinerja Polantas juga dapat ditunjukkan dalam *content* tersebut. Sehingga Polantas, masyarakat dan seluruh elemen yang ada mampu untuk mengevaluasi, memperbaiki dan meningkatkan kinerja Polantas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dengan demikian keberadaan polisi dapat diterima dan cocok dengan masyarakat jika

8 Chryshnanda DL. Panel Diskusi Transportasi. "problem solving kkebijakan dan regulasi Transportasi angkutan perkotaan di Indonesia. 21 Januari 2017. yogyakarta

9 Kapolri Launching Aplikasi 'Polisi Kita Sumatera Utara' di Medan <http://news.liputan6.com/read/2847226/kapolri-launching-aplikasi-polisi-kita-sumatera-utara-di-medan>

10 Chryshnanda DL. Kenapa mereka takut dan enggan berurusan dengan polisi. Komunikasi dan informasi. YPKIK. 2013

Polisi dapat menunjukkan bahwa pemolisiannya dirasakan aman bagi masyarakat, menyenangkan masyarakat dan bermanfaat bagi masyarakat¹¹.¹¹ Prinsip pemolisian yang berbasis IT atau yang dikenal dengan istilah *e-policing* dapat terpenuhi dan komunikasi serta informasi antara Polantas dan masyarakat tidak pernah putus, terjalin secara kontinyu dan sinergis.

Pembahasan

Aplikasi/ program yang coba untuk ditawarkan kali ini adalah bukan merupakan sesuatu yang baru di tubuh Polisi lalu lintas. Karena melakukan perubahan berdasarkan teknologi dengan memanfaatkan sesuatu yang telah ada, terukur dan dilakukan pengembangan menggunakan IT, tetapi bukan merupakan penciptaan hal-hal yang baru sebagaimana yang terdapat dalam konsep *Business Process Re-engineering* (BPR).¹² Dalam konsepnya menerangkan bahwa suatu organisasi harus mampu dan menilai tentang situasi dan kondisi saat ini, sehingga mampu melakukan perubahan radikal yang terukur sesuai dengan kebutuhan organisasi. Tahap-tahapan dalam BPR antara lain sebagai berikut:

1. Mengembangkan pilihan untuk perubahan radikal

a. Kemampuan IT sebagai pengampu perubahan

- 1) IT diharapkan mampu dijadikan sarana perencanaan dalam suatu organisasi dan merealisasikan tujuan dari organisasi tersebut. Sebagai contoh di Polantas, IT dapat membantu Polantas dalam melaksanakan tugas sehari-hari, serta mampu mencapai tujuannya dalam memelihara

Kamseltibcarlantas, menegakkan hukum serta sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat.

- 2) Pengaruh IT terhadap kinerja dan kontribusi organisasi dalam menentukan langkah-langkah strategis. Dengan adanya IT mampu menjadi alat, teknik serta kerangka kerja untuk menyelaraskan strategi IT dengan strategi organisasi serta mencari kesempatan baru melalui penerapan teknologi yang inovatif.

b. Mengidentifikasi perlunya perubahan dalam pengembangan strategi organisasi

Sebelum melakukan perubahan perlu dipahami situasi saat ini, dengan mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dari suatu organisasi serta mengoperasikan IT, artinya Polantas harus mampu melihat organisasinya serta penggunaan IT yang efektif dan efisien (sesuai dengan kemampuan).

2. Evaluasi pilihan

IT dapat menjadi model, simulasi, prototype pilihan untuk perubahan, kondisi sebelumnya kurang bermanfaat bagi tujuan organisasi, kemudian adanya peluang serta fenomena yang meningkat dan adanya yang keunggulan dari suatu kompetisi dalam suatu organisasi karena mampu memanfaatkan IT secara maksimal. Pemanfaatan IT kurang bermanfaat, dikarenakan pada saat itu perencanaan IT hanya berfokus kepada teknologi, bukan kepada kebutuhan organisasi itu sendiri. Oleh karena itu dalam penulisan ini penulis menawarkan program maupun aplikasi yang bukan melihat teknologi semata yang ditawarkan, melainkan kebutuhan Polantas dalam melaksanakan tugas sehari-harinya serta memberikan pelayanan prima

11 Chryshnanda DL. Menjadi Polisi Yang berhati Nurani. YPKIK. 2009

12 John Ward and Joe Peppard, Strategic Planning for Information Systems, 3rd edition, chapter 4 Assessing and Understanding the Current Situation, John Wiley and Sons Ltd, England

kepada masyarakat, sehingga timbul dan meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Polantas.

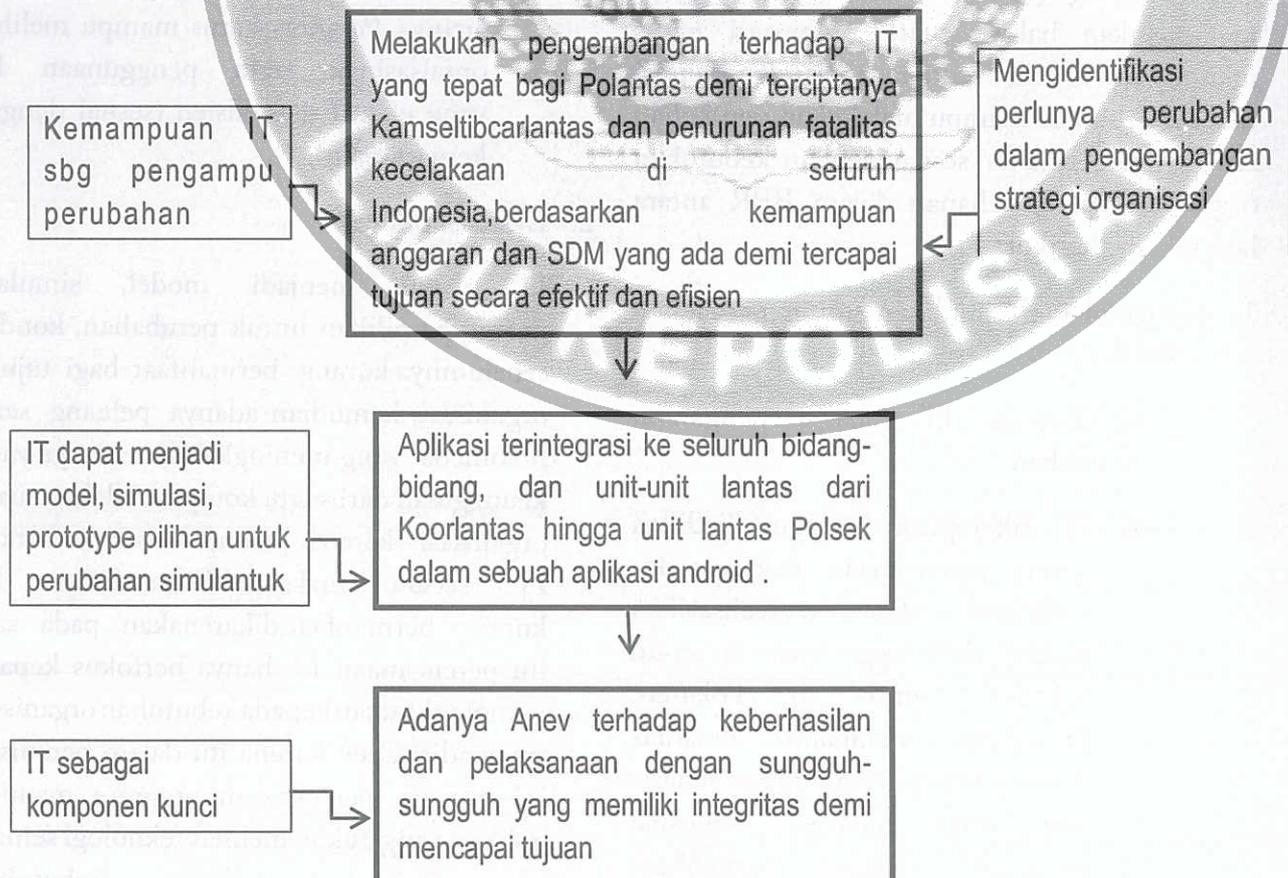
3. Pelaksanaan yang dipilih

IT sebagai komponen kunci untuk mencapai perubahan, sebuah aspek kunci dari proses perumusan adalah memastikan organisasi mau dan mampu menerapkan strategi yang dipilih. Akan tergantung banyak pada bagaimana strategi itu berasal, dan siapa yang terlibat, karena akan terlihat dalam strategi nyata. Tujuannya adalah untuk meminimalkan resiko kegagalan, memastikan keterlibatan semua pihak yang berkepentingan serta meminimalisir ketergantungan individu, dan lebih menekankan kepada proses dan sasaran yang ditentukan.

Untuk itu perlu ditingkatkan:

- a. Sumber Daya Manusia dalam hal ini personel Polantas sebagai pengguna teknologi sudah harus mahir dengan dibekali pelatihan-pelatihan dalam menunjang pekerjaan.
- b. Integritas, bahwa dalam suatu pekerjaan diperlukan integritas yang tinggi agar pekerjaan berjalan dengan baik demi tercapainya tujuan dari suatu organisasi. Hal ini sangat diperlukan karena berkaitan dengan keamanan sebuah informasi.
- c. Keamanan dari aplikasi yang diperbuat, sehingga aplikasi tidak gampang untuk di *hack* oleh pihak lain.

BPR UNTUK POLANTAS



Gambar 1

Dengan demikian pilihan program/ aplikasi yang penulis tawarkan lebih kepada bagaimana seluruh bidang-bidang serta unit-unit lintas yang ada di Polsek baik dari pusat hingga ke daerah dapat terkoneksi dalam sebuah aplikasi. Artinya bentuk-bentuk kinerja, permasalahan serta pengaduan masyarakat mengenai lalu lintas di seluruh Indonesia bisa terintegrasi dari Korlantas hingga ke unit-unit lintas yang berada di Polsek-Polsek dalam sebuah aplikasi android dengan masing-masing operator tiap level dan wilayah.

Konsep BPR dapat diuraikan dalam gambar berikut:

Konsep BPR pada Polantas yang coba ditawarkan tersebut senada dengan pemikiran yang telah direncanakan oleh program PINTAS (Police Intelligent Traffic Anaysis System) yang dicetuskan oleh Chryshnanda DL,2017 antara lain: Dalam era digital system *Back office*, aplikasi dan network merupakan model untuk mengimplementasikan pelayanan prima (cepat, tepat akurat, transparan, akuntabel, informatif dan mudah diakses). Dalam *Back office* terdapat database, memuat: Situasi, Tugas pokok, Pelaksanaan, System administrasi, Pelaporan dan Pusat K3I (Kodal, Koordinasi, Komunikasi, dan Informasi). *Back office* sebagai otak dari segala penyelenggaraan tugas di lapangan juga diawaki oleh orang-orang yang *smart*, yang mampu menggerakkan semua fungsi/ bagian secara cepat, tepat, akuntabel, informatif dan mudah diakses. *Back office* memiliki model-model penanganan masalah rutin, khusus bahkan kontijensi. Pada masa-masa kritis *Back office* mampu berfungsi sebagai *Crissis centre* karena didukung oleh pusat-pusat data, pusat-pusat monitor dan pengendalian¹³. Alasan penulis memilih dan mengembangkan aplikasi yang terintegrasi tersebut adalah karena polisi

13 Chryshnanda DL. Panel Diskusi Transportasi. "problem solving kebijakan dan regulasi Transportasi angkutan perkotaan di Indonesia. 21 Januari 2017. yogyakarta

termasuk institusi/ lembaga yang memiliki prestasi rendah dalam pelayanan publik di Indonesia sebagaimana yang dilansir dalam KBR Sabtu, 31/12/2016 11:06 WIB: "Lembaga Ombudsman Republik Indonesia menyatakan pengaduan masyarakat terkait pelayanan publik di Kepolisian menempati urutan tertinggi pada tahun ini. Anggota Ombudsman Adrianus Meliala memerinci, pengaduan paling banyak mengenai penundaan berlarut atau mal administrasi dalam menangani kasus di Kepolisian. Selain itu juga, penyimpangan prosedur dan tidak memberikan pelayanan. Catatan akhir tahun Ombudsman soal pelayanan lembaga penegak hukum menyebut, aduan di kepolisian mencapai 1612 laporan. Peringkat kedua terbanyak adalah pengadilan dengan pengaduan sebanyak 392 laporan. Diikuti Kejaksaan sebanyak 106 laporan pengaduan."¹⁴

Berbagai harapan yang tinggi dicurahkan masyarakat terhadap Polri. Karena Polisi merupakan tempat sandaran masyarakat dalam mencari akar permasalahan serta mampu untuk menyelesaikannya. Namun harapan yang diinginkan terkadang tidaklah sesuai dengan kenyataan yang ada. Berbagai hujatan, umpatan bahkan caci maki diberikan masyarakat terhadap polisi, semuanya itu muncul akibat ketidakpercayaan masyarakat terhadap Polisi. Oleh karena itu membangkitkan kepercayaan adalah merupakan kunci utama Polri dalam memulai kinerja yang dianggap sukses dan berhasil. Kepercayaan menjadi suatu yang hakiki bagi suatu institusi. Kepercayaan menjadi suatu nilai yang tertinggi bagi sebuah prestasi kerja. Kepercayaan juga merupakan hasil dari profesionalisme dan ketulusan bekerja. Kepercayaan bukan merupakan suatu yang instan, dan melalui proses yang saling terkait satu dengan yang lainnya. Kepercayaan merupakan buah dari ketulusan dan profesionalisme yang

14 Kepolisian Jadi Lembaga Penegak Hukum yang Terbanyak Diadukan Ombudsman (http://kbr.id/berita/122016/kepolisian_jadi_lembaga_penegak_hukum_yang_terbanyak_diadukan_ke_ombudsm_an/87870.html)

ditunjukkan oleh kinerja dan produknya yang signifikan dapat dirasakan oleh masyarakat.¹⁵ Bagaimana mungkin sebuah kinerja berjalan dengan baik, apabila tujuan utama tidak dapat dipenuhi secara maksimal oleh suatu organisasi. Maka sudah saatnya citra Polri harus ditingkatkan guna mencapai cita-cita dan harapan masyarakat kepada Polisi terutama bagi Polantas.

Berdasarkan laporan Ombudsman tahun 2016 di atas, penulis berupaya menyumbangkan inovasi berupa pemikiran, upaya meningkatkan pelayanan publik oleh institusi Polri, setidaknya sumbangan pemikiran yang dituangkan dalam konsep berpikir serta diimplikasikan melalui sebuah aplikasi, mampu untuk meminimalisir segala bentuk pelanggaran yang ada di Polantas. Sehingga cita-cita dan harapan Polri sesuai dengan Grand strategy Polri yang pertama pada Tahap awal yaitu mewujudkan *trust* (kepercayaan) kepada masyarakat dapat berjalan dengan baik. Saat ini Polisi telah memasuki Tahap ke-3 dalam Grand Strategy Polri, sudah saatnya pengembangan pelayanan yang berbasis teknologi (*e-policing*) ini untuk lebih dikembangkan dan disosialisasikan kembali kepada masyarakat. Secara garis besar konsep yang ditawarkan sudah ada di tubuh Polantas hanya saja belum terintegrasi satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu fitur-fitur yang akan dibentuk ini lebih kepada mengintegrasikan seluruh aplikasi Polantas yang telah dimiliki, agar mampu dinikmati, dipergunakan untuk kebutuhan organisasi maupun masyarakat.

Dengan adanya aplikasi yang saling terintegrasi dan terkoneksi, dapat mempersempit celah ataupun ruang untuk berbuat pelanggaran maupun penyimpangan bagi seluruh penyelenggara pelayanan di Polantas. Namun tidak semua informasi yang dapat dibuka sesuai dengan harapan masyarakat. Ada hal-hal

tertentu data informasi dibatasi oleh Kepolisian dengan pertimbangan keamanan bagi para pengguna. Apabila terdapat pelanggaran atau penyalahgunaan informasi oleh para pengguna aplikasi yang, pihak kepolisian akan memberikan tindakan/ sanksi tegas dan nyata. Hal ini tergantung seberapa besar dampak dari tindakan dan pelanggaran yang dilakukan oleh pengguna aplikasi ini. Apabila bersifat candaan atau gurauan ataupun memberikan informasi yang tidak benar, nomor tersebut dapat diblock oleh operator sehingga aplikasi ini tetap terus berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan utamanya, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap Polantas semakin meningkat.

Program/ aplikasi lintas yang terintegrasi dapat digambarkan sebagai berikut:

Aplikasi Terintegrasi Seluruh Polda

Berdasarkan gambar di atas sangatlah sederhana konsep yang ditawarkan, seperti menginput, menyimpan dan mengolah data serta menghubungkan kepada aplikasi yang telah ada di Korlantas, Direktorat Lantas Polda-Polda, Satlantas Polres-Polres, sehingga para pengguna atau penikmat aplikasi ini mampu berkomunikasi dan memperoleh informasi yang dibutuhkan terkait dengan permasalahan lalu lintas.

Prinsip BPR adalah memanfaatkan teknologi yang ada untuk dimodifikasi guna memperoleh tujuan dari organisasi, bukan sebaliknya memanfaatkan teknologi tetapi tujuan organisasi tidak tercapai. Hal ini yang mengilhami penulis untuk menawarkan aplikasi yang berisikan fitur-fitur permasalahan lalu lintas dan tugas-tugas Polantas serta menghubungkannya dengan seluruh Polda dan Polres yang ada di wilayah Indonesia. Yang dimaksud dengan aplikasi terkoneksi adalah sebuah aplikasi dimana pemakai aplikasi

15 Chryshnanda DL. Kenapa mereka takut dan enggan berurusan dengan polisi. Komunikasi dan informasi. YPKIK. 2013

tersebut secara terus-menerus dapat melakukan koneksi ke suatu database sepanjang aplikasi tersebut dijalankan.¹⁶ Hal ini yang dilakukan antara Korlantas dan seluruh jajaran yang ada agar selalu terkoneksi/terhubung sehingga bisa digunakan oleh seluruh masyarakat.

Sedangkan sistem informasi terintegrasi merupakan salah satu konsep kunci dari sistem informasi manajemen. Berbagai sistem dapat saling berhubungan satu sama lain dengan berbagai cara yang sesuai dengan keperluan integrasinya. Salah satu di antaranya adalah dengan arus data faktual atau potensial di antara mereka.¹⁷ Dengan demikian pemahaman tentang aplikasi yang selalu terhubung dan terintegrasi adalah demi tercapainya suatu bentuk kerjasama dalam informasi antara aplikasi satu dengan yang lainnya, agar selalu terhubung dan memberikan informasi apa yang dibutuhkan oleh suatu wilayah atau bidang maupun fungsi di Polres-Polres sehingga terciptanya pelayanan yang cepat, tepat, akurat, akuntabel, informatif dan mudah diakses. Karena aliran informasi diantara sistem sangat bermanfaat apabila data di dalam file dari satu sistem diperlukan juga oleh sistem yang lainnya.

Kesimpulan

Untuk menimbulkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap Polri, khususnya Polantas yang selama ini telah tercoreng oleh beberapa kegiatan baik itu pelayanan maupun penegakan hukum, Polantas harus menampilkan model dan pola pemolisian melalui elektronik atau electronic policing (e-policing). Pemolisian

yang berbasis IT ini didasarkan kepada visi dan misi Kapolri saat ini yang dikenal dengan istilah Profesional, Modern dan Terpercaya (Promoter). E-Policing diharapkan mampu untuk memberikan efisiensi kerja maupun efisiensi pelayanan kepada masyarakat, serta menghindari hubungan langsung antara person to person yang dapat menimbulkan peluang terjadinya penyimpangan. Pelayanan publik yang dilakukan oleh Polantas terdiri dari pelayanan keamanan, pelayanan keselamatan, pelayanan administrasi, pelayanan informasi, pelayanan hukum dan keadilan dan pelayanan sosial kemanusiaan. Beberapa kegiatan Polantas baik secara rutin di lapangan maupun pelayanan terhadap masyarakat telah menggunakan IT dalam mekanisme kerjanya, antara lain program e-tilang, samsat on-line, sim on-line, program NTMC, dan program IRSMS pada kecelakaan

model pemolisian yang menggunakan aplikasi atau program yang berisikan fitur-fitur yang saling terkoneksi dan terintegrasi antara Korlantas, Direktorat Lalu Lintas dan Satuan Lalu lintas pada masing-masing Polres. Tujuannya adalah untuk mempermudah para pengguna aplikasi dalam mengakses segala bentuk permasalahan yang ada di lalu lintas di seluruh wilayah Indonesia, tanpa dibatasi waktu maupun tempat dalam memperoleh informasi maupun dalam berkomunikasi. Dengan adanya aplikasi yang saling terintegrasi dan terkoneksi juga dapat membantu mempersempit celah ataupun ruang untuk berbuat pelanggaran maupun penyimpangan oleh seluruh penyelenggara pelayanan di Polantas sehingga tujuan utama Polantas dalam memberikan pelayanan yang prima dapat terpenuhi. Dengan demikian pemahaman tentang aplikasi yang selalu terhubung dan terintegrasi dilakukan demi tercapainya suatu bentuk kerjasama dalam informasi antara aplikasi satu dengan yang lainnya agar selalu terhubung dalam memberikan informasi apa yang dibutuhkan dapat tercapai,

16 Aplikasi terkoneksi <http://chaosbolonk.blogspot.co.id/2010/12/aplikasi-terkoneksi-dan-aplikasi.html>

17 Sistem terintegrasi <http://www.ahliartikel.com/2016/03/pengertian-integrasi-sistem-informasi.html>

sehingga terciptanya pelayanan yang cepat, tepat, akurat, akuntabel, informatif dan mudah diakses.

Saran :

Sistem aplikasi yang dimiliki Polri saat ini sudah cukup baik, khususnya Polantas. Tetapi masih saja terdapat kelemahan dalam mengoperasionalkannya, yaitu aplikasi atau program yang dimiliki masih bersifat parsial belum secara simultan terkoneksi dan terintegrasi di seluruh wilayah Indonesia. Oleh karena itu dibutuhkan suatu terobosan kreatif dengan memanfaatkan aplikasi yang telah ada untuk dibuat secara terkoneksi dan terintegrasi. Dalam rangka meningkatkan mutu dan kualitas personel Polantas di seluruh wilayah Indonesia, agar diberikan pengetahuan dan pelatihan khusus untuk mengoperasionalkan aplikasi atau suatu program. Penggunaan IT dalam pemolisian perlu mendapatkan atensi oleh seluruh jajaran di wilayah maupun bidang dan fungsi, mengingat perubahan zaman pada era globalisasi yang saat ini sedang kita rasakan.

Demikian tulisan ini, semoga dapat bermanfaat untuk menambah ilmu pengetahuan dan dapat memberikan masukan kepada Polisi Lalu lintas dalam rangka membangun Polri yang lebih baik dan dipercaya masyarakat di masa yang akan datang.

Daftar Pustaka

Buku :

1. Brien James dan Marakas George. Sistem Informasi Manajemen. Salemba empat. 2014
2. Chrysnanda DL. Demokratisasi Pemolisian dan Strategi keluar dari zona aman. YPKI. 2016
3. Chrysnanda DL. Kenapa mereka takut dan enggan berurusan dengan polisi? Polantas dicaci dan dinanti. Hal 31 YPKIK. 2013

4. Chrysnanda DL. Ilmu kepolisian, kurikulum, pengajaran dan pengembangannya. Hal 11. STIK- Jakarta. 2015
5. Chryshnanda DL. Menjadi Polisi Yang berhati Nurani. YPKIK. 2009
6. Chryshnanda DL. Othak- Athik Gathuk. Celometan Mafia Birokrasi. FolkMataraman Institute. 2016
7. John Ward and Joe Peppard, Strategic Planning for Information Systems, 3rd edition, chapter 4 Assessing and Understanding the Current Situation, John Willey and Sons Ltd, England
8. Undang-Undang No. 22 tahun 2009 tentang lalu Lintas dan Angkutan jalan (LLAJ)
9. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik

Jurnal:

10. I Nengah Suparta, Ketut Agustini, I Made Gede Sunarya, I Made Agus Wirawan. Pengembangan Sistem Terintegrasi Untuk Panduan Pariwisata Berbasis Mobile Sebagai Daya Dukung Peningkatan Pariwisata di Kabupaten Buleleng. Universitas Pendidikan Ganesha Vol. 2, No. 2, Oktober 2013
11. Rudi Sumarno. Penerapan E-Library di Universitas Atmajaya Yogyakarta. Jakarta. 2014

Lain-lain :

12. Amanat Presiden SBY dalam apel pencaanangan Gerakan Nasional Pelopor Keselamatan Berlalu Lintas (<http://www.koranbireuen.com/2014/01/lalu-lintas-sebagai-cermin-budaya-bangsa/>)
13. Aplikasi Polisi Kita Sumatera Utara, e-

- Policing (google playstore) for android
14. Aplikasi terkoneksi <http://chaosbolonk.blogspot.co.id/2010/12/aplikasi-terkoneksi-dan-aplikasi.html>
15. Chryshnanda DL. Manajemen Lalu lintas. Bahan anjar Mahasiswa S2 STIK-PTIK. 2017
16. Chryshnanda DL. Panel Diskusi Transportasi. "problem solving kkebijakan dan regulasi Transportasi angkutan perkotaan di Indonesia". 21 Januari 2017. Yogyakarta
17. Grand Strategy Polri (www.polisiku.net/article-33-grand-strategi-polri-2005-2025.html)
18. Kapolri Launching Aplikasi 'Polisi Kita Sumatera Utara' di Medan <http://news.liputan6.com/read/2847226/kapolri-launching-aplikasi-polisi-kita-sumatera-utara-di-medan>
19. Kepolisian Jadi Lembaga Penegak Hukum yang Terbanyak Diadakan ke Ombudsman (<http://kbr.id/berita/122016/kepolisian-jadi> lembaga penegak hukum yang terbanyak diadakan ke ombudsman/87870.html)
20. Korlantas Polri <http://korlantas-irsms.info/>
21. Korlantas Polri Rilis Aplikasi SIM Online hingga e-Tilang <http://news.okezone.com/read/2016/12/16/337/1568013/korlantas-polri-rilis-aplikasi-sim-online-hingga-e-tilang>
22. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2010 tentang Tata Cara Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia
23. Sistem terintegrasi <http://www.ahliartikel.com/2016/03/pengertian-integrasi-sistem-informasi.html>
24. Traffic Management centre (TMC) www.Lantasmetro.polri.go.id
25. Visi Kapolri Promoter, Modern. <http://news.detik.com/berita/3253952/catat-ini-visi-misi-kapolri-jenderal-tito>